

ETIKA DALAM MENGRURUS NEGARA

Ermalindus A. J. Sonbay
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
e-mail: ermalindo@gmail.com

Abstract: Ethics in Care of the State. Ethics is an important dimension in the life of the nation. We are given the opportunity to reflect on the ethical elements in the opinions of our spontaneous. Reflection is important because there will be a conflict of opinion between the parties with the other one. Therefore we need ethics to figure out what should be done by humans. Ethics requires a critical attitude, methodical, and systematic reflection. That's why ethics is a science. As a science, the object of ethics is human behavior that has a normative standpoint. In the context of the care of the State, there are many ethical dimensions that lead the officials, partners and people to promote goodness, truth, and unity. If ethics is well run, then our country will achieve the overriding objective, namely the common welfare.

Keywords: ethics, states, banality

Abstrak: Etika dalam Mengurus Negara. Etika merupakan dimensi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita diberi kesempatan untuk merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Refleksi menjadi penting karena akan terjadi benturan pendapat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Oleh karena itu kita membutuhkan etika untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia yang memiliki sudut pandang normatif. Dalam konteks mengurus Negara, ada banyak dimensi etika yang menuntun para pejabat, mitra, dan rakyat untuk mengedepankan kebaikan, kebenaran, dan persatuan. Kalau etika dijalankan dengan baik, maka Negara kita pun akan mencapai tujuan terbesarnya yaitu kesejahteraan bersama.

Kata kunci: etika, negara, banalitas

PENDAHULUAN

Ketika sekelompok orang mendiami satu tempat pada waktu yang sama, akan muncul banyak ketegangan dan friksi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Ketegangan dan konflik muncul karena menurut Hobbes manusia pada hakikatnya adalah serigala satu bagi yang lain (*Homo Homini Lupus Est*)—Hobbes: *Leviathan*, 'Homo Homini Lupus' is the title of Episode 14, Season 1 of *Law & Order: Criminal Intent*. Hobbes mengemukakan pandangan filosofis ini dengan harapan agar kondisi komunal manusia bisa berorientasi pada yang baik dan benar dengan kepasrahan untuk tidak menggunakan insting serigalanya. Di kesempatan ini sebenarnya Hobbes lebih banyak berbicara mengenai pentingnya hukum dan peraturan yang bisa mengurangi hasrat manusia untuk senantiasa memangsa sesamanya karena naluri serigalanya yang kuat. Hukum dan peraturan kemudian didefinisikan sebagai bagian penting dalam masyarakat yang tersusun akibat akumulasi dan pengkristalan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Masyarakat dengan demikian

membutuhkan panduan sistematis mengenai apa yang harus dibuat untuk mendatangkan kebaikan yang purna dan tetap lestari.

Ideal Hobbes ini kemudian dikembangkan oleh John Locke dalam pemikiran mengenai kontrak sosial yang secara substansial berbeda dengan pandangan Hobbes dalam *Leviathan*. Locke memberi penekanan pada esensi manusia yang secara natural adalah baik dan akan berorientasi pada pengembangan kebaikan tersebut. Namun, untuk menjamin agar kebaikan tersebut terkawal dan tidak arkhais, dibutuhkanlah sebuah tatanan konseptual yang bernama kontrak sosial. Individu-individu dengan kecenderungan, keinginan dan hasrat alamiah yang berbeda, haruslah menyerahkan ketunggalan-ketunggalannya pada kontrak yang pada dasarnya juga mengakomodasi kepentingan pribadi-pribadi. Dan di sinilah etika sebagai bagian penting dari kontrak sosial memainkan fungsinya. Etika bisa juga dibaca sebagai kontrak sosial menyangkut aturan yang akan ditaati, etika juga bisa menjadi pegangan dan acuan hidup bagi semua yang bernaung di bawah kontrak sosial.

Hobbes dan Locke jelas memulai utilitarianisme pra-modern dengan mengharapkan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang dengan sebanyak mungkin potensi pengembangan kebaikan itu sendiri. Utilitarianisme berkembang sebagai salah satu model filsafat moral yang selama beberapa masa menguasai dan memengaruhi tendensi berpikir para filosof moral khususnya di jaman keemasan skolastik abad pertengahan melalui Aquinas, Bonaventura, Albert Agung, dll.

Selain itu, filsafat moral juga merupakan adaptasi lain dari proses akumulasi pemikiran mengenai keindahan dan kebenaran yang jadi acuan kuat generasi berpikir semenjak epistemologi memperoleh tempat dalam kerangka filosofis yang sistematis dan kritis. Dari dasar ini juga, kelahiran etika sebagai disiplin ilmu dibantu sejak jauh-jauh hari oleh hidup dan berkembangnya nilai dalam masyarakat. Etika tidak lahir begitu saja tetapi melalui proses dan tahapan sejarah yang tentunya memakan waktu yang cukup lama.

DEFINISI YANG LAZIM

Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia (K. Bertens: 2000. Hal. 25).

Seringkali orang cenderung menggabungkan dengan rancu pengertian antara etika dan etiket. Berikut akan dipaparkan juga bagaimana etika dan etiket itu pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan di antara keduanya justru diharapkan mampu dipahami dan bisa memberi pengertian yang jelas dan tentunya etis serta humanis. Beberapa perbedaan yang kuat:

Pertama, etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Contohnya ketika kita memberikan sesuatu dengan orang lain kita harus menggunakan tangan kanan. Sedangkan etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Contohnya adalah larangan mencuri. “larangan

mencuri” adalah suatu norma etika, apakah itu dicuri dengan tangan kiri atau kanan sama sekali tidak relevan dalam hal ini.

Kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan, tidak berlaku jika tidak ada orang lain atau saksi mata. Contohnya pada tata cara makan. Dianggap melanggar ketika kita makan sambil berbicara atau mengangkat kaki jika sedang makan bersama. Akan tetapi dianggap tidak melanggar jika pelaku hanya sendirian. Sedangkan etika tidak tergantung ada atau tidaknya orang lain. Terlepas ada atau tidaknya orang lain kita tetap tidak boleh mencuri.

Ketiga, etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa jadi diterima di kebudayaan orang lain. Contohnya bersendawa ketika makan. Sedangkan etika jauh lebih absolut. “larangan membunuh” adalah prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi “dispensasi”.

Keempat, jika kita berbicara tentang etiket, kita hanya memandang manusia dari segi lahiriahnya saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Bisa saja orang tampil sebagai “serigala berbulu domba”, di luar sangat sopan dan halus, tapi di dalam penuh kebusukan. contohnya seorang penipu.

MODEL ETIKA YANG UTAMA

Secara umum terdapat dua model etika yang merupakan pengerucutan (kristalisasi, atau juga bisa didefinisikan sebagai puncak tertinggi dari perjalanan perkembangan etika, yakni utilitarianisme dan deontologi.

Utilitarianisme

Utilitarianisme sering juga disebut *the greatest happiness theory*. Dikembangkan oleh J. Stuart Mill & J. Bentham (Abad 19) berdasarkan pemikiran David Hume (1711) di mana konsepsi dasarnya terarah pada pembentukan nilai moral yang memberi manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Dari semua pertimbangan yang ada harus ada manfaat untuk sebanyak mungkin orang. Posisi sebanyak mungkin orang akhirnya dikembangkan menjadi ide dasar dari pengembangan demokrasi modern dan demokrasi pasca-modern di mana segala yang baik dan benar adalah segala yang memenuhi kuorum pengambilan keputusan yang mewakili suara terbanyak. Yang baik, yang benar, yang adil, yang berwibawa, yang satu dan yang indah adalah yang memberikan efek kemajuan bagi sebanyak mungkin orang.

Model ini memiliki beberapa kelebihan antara lain: rasional, universal (bisa mengakomodasi kepen-

tingan mayoritas), liberal (bebas), merupakan salah satu bentuk sederhana dan paling gampang dalam menentukan batasan tentang penerapan sebuah nilai dan pedoman serta model ini pada posisinya yang menekankan kepentingan sebanyak mungkin orang adalah model yang dominan digunakan pada masa modern ketika pemikiran pada subjek manusia mewarnai begitu banyak diskursus filsafat.

Di samping memiliki kelebihan, model ini juga memiliki beberapa kekurangan mendasar seperti, mengesampingkan kepentingan dan suara kelompok minoritas, terkadang inventarisasi kemanfaatan untuk dan dari semua orang terkesan tendensius dan mudah dikooptasi oleh kekuasaan, mengabaikan nilai *in se* karena lebih cenderung berkiblat pada akibat dari nilai yang dijalankan, tidak adanya holistisitas dalam kualifikasi variabel-variabel moral khususnya dalam pembentukan nilai-nilai dasar dan standar yang akan digunakan dalam masyarakat. Model utilitarianisme juga tidak bisa mendamaikan kontradiksi yang muncul dari rasionalitas, utilitarianitas dan universalitas²². Selain itu, konsepsi ini juga terlalu luas dan untuk kepentingan praktis/pragmatis dan akan menemui jalan buntu khususnya bagi kepentingan pembentukan keadilan bagi kelompok minoritas.

Utilitarianisme yang cenderung dipakai secara mutlak akan mengesampingkan peran sesungguhnya dari para anggota yang berkumpul dalam suatu komunitas yang mengapresiasi nilai moral tertentu untuk tidak lagi menganggap tanggung jawab sebagai sesuatu yang utama dalam melahirkan dan menyelamatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih manusiawi. Hal ini dikarenakan moralitas utilitarianisme yang dikembangkan seolah tanpa arah adalah moralitas yang akan digiring ke ranah tertutup, tergantung kepentingan kelompok mayoritas.

Deontologi

Imperatif kategoris adalah juga nama lain dari model deontologi yang secara umum memberikan penekanan yang kuat pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan apa yang ada dalam aturan dan norma yang berkembang. Model ini mengerucut pada era Kantian dengan pawangnya Immanuel Kant (1724-1804). Sebenarnya pemikiran deontologi telah mengemuka pada beberapa pandangan filosof abad pertengahan, khususnya pada Agustinus dan Thomas Aquinas yang memberi pencerahan pada masanya dengan mengulas posisi manusia secara holistik, khususnya dalam hubungan manusia dan sesama, alam dan juga pencipta. Namun, ideal etika ini sukses dengan kehadiran Immanuel Kant yang secara umum mendobrak konsistensi berpikir manusia Eropa kala itu

yang terlanjur terjatuh dalam paham utilitarianisme. Konsepsi Kant ini memberi aksentasi pada pemberla-kuannya untuk semua orang di semua tempat. “*Deon*” dalam Bahasa Yunani identik dengan “kewajiban” dalam Bahasa Indonesia. Ideal ini juga merupakan dasar untuk membangun distingsi yang jelas bagaimana suatu perbuatan *harus* atau *tidak boleh* dilaksanakan.

Dalam ranah administrasi negara, konsepsi deontologis kemudian lebih banyak diterima karena untuk menjamin kelangsungan (lestariannya) administrasi negara dibutuhkan sebuah keteguhan untuk benar-benar melaksanakan aturan sampai pada tahapan menghidupi aturan secara riil. Etika itu pada konteks mikro adalah aturan yang dikeluarkan dan ditetapkan untuk dilaksanakan secara umum sebagai bagian dari konsensus. Kesempatan melaksanakan prinsip, norma, aturan bahkan perundangan inilah yang kemudian mengikat semua elemen warga negara ke dalam tanggung jawab. Ketika semua elemen negara melaksanakan tanggung jawabnya khususnya yang berafiliasi dekat dengan aturan, atau melaksanakan aturan *an sich*, sebagai sebuah jaminan hidup, pada saat itulah etika yang tercermin dalam aturan ditegakkan. Oleh karena itu jika ada unsur penolakan atau pemberontakan terhadap aturan, sepantasnya dimengerti sebagai ada kesempatan melaksanakan kewajiban yang terlewatkan, ada posisi kewajiban yang hilang dan kurang.

Deontologi memudahkan individu dan kelompok untuk menajamkan niat baik, tanggung jawab, terlebih sikap hormat pada nilai moral serta kewajiban yang digariskan oleh aturan. Aturan di titik ini adalah konsensus bersama yang mewadahi kepentingan-kepentingan mayoritas dan minoritas. Ketundukan yang mutlak pada keharusan inilah yang membuat Kant mengonsepsikan model etikanya sebagai sebuah imperatif kategoris. Imperatif kategoris ini lebih banyak akan memengaruhi apa yang harus dibuat dan apa yang harus (tidak boleh) dibuat.

Karena penekanan yang absolut pada perintah untuk melakukan dan atau tidak melakukan inilah maka deontologi Kantian memiliki beberapa kekurangan antara lain, kaku dan tidak progresif (selalu melihat perilaku manusia dari dua sisi saja, atau dibuat atau tidak). Terperangkap dalam aksentasi yang berlebihan pada tanggung jawab dan niat baik untuk melaksanakan sebuah aturan/imperatif moral membuat orang lebih banyak melupakan akibat dari perbuatan (penekanan pada aspek legal-formal). Kelupaan pada akibat suatu perbuatan menurut Kant tidak akan terjadi karena pada dasarnya etika yang dijalankan akan bertahan pada ranah tanggung jawab sebelum, sementara dan sesudah sebuah perbuatan baik dilaksanakan. Akan

tetapi, pada keadaan tertentu bisa kelupaan ini bisa melindapkan khalayak dan posisi rakyat kebanyakan hanya untuk melaksanakan tanggung jawab.

Konsepsi deontologi juga bisa membangun konsepsi berpikir pincang dengan orientasi pada kewajiban sambil melupakan hak dan jejaringan kewajiban itu sendiri. Semua ini disebabkan karena terlalu formal bagi negara dan elemennya untuk memetakan kewajiban secara detail. Bahaya ini memang sudah diantisipasi oleh Kant dengan mengatakan bahwa sesuatu perbuatan baik adalah baik dalam dirinya sendiri dan akan membawa kebaikan bagi semua yang berada di luar dirinya (*ut omnes bonum interno est bonum externo*). Formalitas di sini bisa jadi memiliki tendensi prosedural yang tinggi, namun sesungguhnya hal ini berkarakter dalam mengubah (lebih tepat membarui) substansi secara konstan dan kontinyu.

Apa yang baik pada dirinya sendiri? Bagi Kant bukanlah benda atau keadaan di dunia dan bukan juga pelbagai sifat maupun kualitas manusia. Sebab keadaan baik di dunia, misalnya persaudaraan, dapat saja disalahgunakan untuk tujuan jahat, lalu menjadi jahat. Begitu pula halnya kualitas seseorang, misalnya keberanian atau kebesaran hati, yang umumnya dianggap terpuji, dapat saja menjadi jahat apabila melandasi rencana jahat. Maka menurut Kant hanya ada satu kenyataan yang baik tanpa batas, baik pada dirinya sendiri, yaitu kehendak baik. Apa itu kehendak baik? Kehendak baik adalah kehendak yang mau melakukan apa yang menjadi kewajibannya, murni demi kewajiban itu sendiri. Untuk memahami pandangan ini, kita harus memperhatikan dua hal:

Pertama, Kant membedakan dengan tajam antara bentuk (*forma*) dan materi (*materie*) tindakan. Tujuan atau akibat yang mau dicapai dengan suatu tindakan adalah materinya. Kehendak baik menurut Kant tidak pernah ditentukan oleh materi atau tujuan tindakan, melainkan oleh bentuknya. Maka kehendak taat pada kewajiban-lah yang menentukan moralitas, bukan tujuan tindakan.

Kedua, orang yang bertindak menurut bentuk tindakan berarti ia bertindak menurut pertimbangan atau patokan tertentu. Patokan ini oleh Kant disebut *Maxime* (prinsip subjektif yang menentukan kehendak). Suatu tindakan itu baik dalam arti moral apabila berdasarkan *maxime* (maksim) yang bersifat moral, dan jahat apabila didasarkan maksim yang tidak bersifat moral. Sebuah maksim yang bersifat moral apabila memuat kemauan untuk menghormati hukum moral. Orang baik adalah orang yang bersedia melakukan ("menghendaki") apa yang menjadi kewajibannya.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah kehendak mana yang sesuai dengan kewajiban? Kant

menjawab, suatu kehendak sesuai dengan kewajiban apabila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan (maksim-maksim) yang dapat diuniversalisasikan. Artinya, yang dapat kita kehendaki agar berlaku bukan hanya bagi kita sendiri, melainkan bagi siapa saja. Suatu maksim bersifat moral apabila dapat diuniversalisasikan (dijadikan hukum umum), bersifat amoral/jahat apabila tidak dapat diuniversalisasikan.

Oleh karena itu, Kant menegaskan paham-paham moral tidak mungkin diperoleh dari pengalaman empiris-inderawi. Paham-paham moral bersifat apriori dan berdasarkan akal budi praktis, yaitu berdasarkan pengertian mengenai baik dan buruk yang mendahului segala pengalaman.

Beberapa prinsip Kantian:

Prinsip "Hukum Umum" (Allgemeines Gesetz)

Prinsip hukum umum mengatakan: "Bertindaklah berdasarkan maksim yang bisa dan sekaligus kamu kehendaki sebagai hukum umum". Maksud Kant dengan prinsip "hukum umum" adalah untuk mengetahui apakah suatu tindakan yang ingin kita lakukan, wajib dijalankan atau tidak, maka kita harus bertanya apakah maksim kita bisa diuniversalisasikan atau tidak. Jika "tidak", maka tindakan itu wajib tidak dijalankan. Jika "ya", maka tindakan itu wajib kita jalankan.

Prinsip Hormat terhadap Pribadi

Prinsip ini mengatakan, "Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau selalu memperlakukan umat manusia entah di dalam pribadimu atau di dalam pribadi orang lain sekaligus sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan hanya sebagai sarana". Prinsip ini mengatakan dua hal: *Pertama*, kita tidak boleh menjadikan diri sendiri atau diri orang lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Semua tujuan lain hanya boleh diusahakan sejauh martabat manusia tetap dijunjung tinggi. *Kedua*, dalam memilih dan menentukan tujuan/mengambil keputusan moral, kita wajib memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari pihak lain. Oleh karena itu, tidak seorangpun boleh diabaikan dan diremehkan.

Prinsip Otonomi

Prinsip ini mengatakan bahwa kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga kehendak akan terwujud sebagai penentu hukum umum". Prinsip ini menegaskan bahwa yang menghendaki dan menjalankan suatu tindakan bukanlah pihak lain, melainkan kita sendiri. Kitalah yang membuat hukum, tanpa ditentu-

kan “di luar” kehendak kita, misalnya tujuan tertentu, perasaan tertentu, atau bahkan kekuasaan lain di luar diri kita. Kant menyebut prinsip ini sebagai “otonomi kehendak” (*Autonomie des Willens*). Kehendak yang otonom adalah kehendak untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum yang telah ditetapkannya sendiri, bukan bertindak tanpa prinsip atau hanya ikut-ikutan orang lain. Kant mengatakan “Tidak ada yang lebih mengerikan daripada tindakan seseorang yang harus tunduk pada kehendak pihak lain”. Kant menyebut prinsip otonomi sebagai “prinsip kesusilaan paling tinggi” (*oberstes Prinzip der Sittlichkeit*), karena langsung membawa kita kepada pandangan tentang kebebasan. Kita menaati hukum moral karena hal tersebut merupakan perwujudan kodrat kita sebagai pelaku yang mendasarkan tindakan pada prinsip rasional yang menyakinkan.

MODEL-MODEL ETIKA LAINNYA

Model etika yang lain hanyalah formula awal yang tumbuh dan berkembang sebelum etika secara konvensional mengerucut pada dua model besar yakni utilitarianisme dan deontologi. Oleh karena itu, model-model etika ini senantiasa memiliki karakteristik yang (hampir) sama dengan dua model utama yang lebih luas ini.

Hedonisme: Model ini memberi aksentasi pada pemahaman bahwa segala yang nikmat adalah baik, kemudian dibarui dengan paradigma baru, segala yang baik adalah yang membawa kebahagiaan. Konsepsi kenikmatan ala hedonisme berhulu pada kebiasaan dan tradisi berbagai macam peradaban Eropa (seperti Yunani dan Romawi) yang memberi tempat pada kenikmatan sebagai bagian yang penting dari kehidupan manusia. Paling kurang hidup harus dihabiskan setengahnya dalam kenikmatan.

Eksistensialis: Untuk *survive*, manusia perlu berjuang melahirkan banyak kebaikan (Sartre). Eksistensialisme juga bisa dibaca sebagai *survive-ilisme*, atau kemauan untuk bertahan dan terus bertahan sembari menenun kebaikan demi kebaikan. Posisi „ada” manusia di titik ini memiliki toleransi yang kuat pada kondisi eksternalnya di mana untuk bertahan sebagai makhluk yang baik, manusia perlu melakukan sebanyak mungkin kebaikan.

Stoisisme/Yunani Klasik: Segala yang berwujud kenikmatan atau kebahagiaan perlu disyukuri. Sedikit mirip dengan Etika Kekristenan pada Masa Skolastik/Abad Pertengahan. Etika kristen atau bahkan model-model etika lainnya yang berbasiskan agama kemudian ditolak untuk ditelaah lebih lanjut dalam perkembangan etika kemanusiaan, karena selain ia lebih menga-

tur hubungan manusia dengan konsep tentang yang tertinggi, etika model ini juga cenderung fatalistik. Manusia tidak bisa bebas menjadi manusia karena terikat sejumlah aturan abstrak tentang yang tertinggi.

Pragmatisme: Untuk Kebaikan hari ini/*Carpe Diem*. Cenderung melupakan masa lalu dan tidak tenggang dengan kehidupan yang akan datang, dekat dengan hedonisme. Segala yang baik adalah segala yang bisa memberi kesempatan kepada manusia untuk menghabiskan hari ini dalam kenikmatan yang tiada tara. Semakin besar kenikmatan yang dirasakan manusia, semakin manusia itu memperoleh kebaikan, demikian konsepsi dasar pragmatisme. Kelompok pragmatis dalam beberapa definisi dibahasakan sebagai kelompok yang hidup hanya untuk hari ini, berbuat hanya untuk hari ini, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi esok.

Naturalisme: Segala yang baik sudah disediakan oleh alam. Alam punya cara menyeleksi apa dan siapa yang harus menerima kebaikan, pun mengapa, bagaimana dan kapan serta di mana. Kelompok pendukung model ini enggan untuk masuk dalam kompleksitas pemikiran progresif, apalagi yang meniadakan peran alam dengan perkembangan yang apa adanya. Seleksi alam, evolusi dan juga pencapaian manusia secara kodrati adalah haluan utama pendukung kelompok ini. Yang baik adalah sesuatu yang sangat natural, manusia sebagai makhluk natural adalah penerima dan pelaksana kebaikan-kebaikan tersebut.

Progresivisme: Diwarnai oleh pemikiran post-modern, segala sesuatu yang baik adalah dialektika yang terbangun dari elemen-elemen kebaikan yang ada. Mazhab pemikiran ini berkembang berdasarkan teori baru mengenai konsepsi hubungan antara manusia yang lebih humanis seperti dalam bagaimana manusia bisa berkomunikasi secara lebih baik (Habermas dan Adorno), bagaimana manusia bisa melawan kecenderungan-kecenderungan mengembangkan teknologi dan pengetahuan artifisial yang akhirnya mendegradasi manusia ke level sub-human (Lyotard), bagaimana manusia bisa menenun kebaikan dalam relasinya dengan yang lain termasuk bagaimana manusia bisa memainkan dengan indahnya kuasa-kuasa yang dimiliki (Foucault) hingga ke bagaimana manusia bisa menenun tulisan hidup yang sempurna ketika segala sesuatu harus mengalami pembaruan pemaknaan, khususnya dalam konteks apresiasi terhadap yang kecil, yang terpinggirkan dalam dekonstruksi yang manusia (Derrida), dll.

Positivisme: Penekanan yang kuat pada ilmu pengetahuan. Mengabaikan pemikiran menyangkut alam, Tuhan, dan juga kolektivitas masyarakat. Segala yang baik dan benar muncul sebagai hasil kerja pengetahuan. Kerja akal-budi memperoleh tempat yang kuat.

EMPAT DIMENSI METAFISIS ETIKA (DALAM MENGURUS NEGARA)

Max Scheler selaku penyampai ideal ini lebih memerhatikan posisi metafisis dari penerapan etika nilai (aksiologis) dalam kehidupan bersama, dalam hal ini tentunya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya termasuk aturan yang hidup dalam konteks bernegara. Administrasi negara kemudian harus menempatkan nilai sebagai sesuatu yang harus dikejar untuk memperbaiki kualitas hidup manusia (pada tingkatan yang sederhana membawa sebanyak mungkin keutamaan dan menghilangkan sebanyak mungkin kekurangan). Ada empat dimensi dasar yang kemudian dipakai dalam konteks pemosisian nilai, antara lain, kebaikan (*bonum*), kebenaran (*verum*), keindahan (*pulchrum*) dan persatuan (*unum*).

Kebaikan (Bonum)

Kebaikan adalah salah satu nilai universal yang menjadi acuan dalam pembentukan begitu banyak norma. Kebaikan hidup dan berkembang dalam tradisi nilai-nilai yang tumbuh dalam kelompok-kelompok tertentu dan dengan sendirinya menjadi acuan paling awal dalam pembentukan model-modelnya yang akan dikembangkan dalam kehidupan bersama. Dalam konteks administrasi negara khususnya yang diterapkan di Indonesia kebaikan memiliki kedekatan dengan begitu banyak tata nilai yang diusung pengurus negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dalam berbagai varian aturan dan norma yang ada. Khususnya kebaikan diharapkan nampak dalam pengejawantahan yang tepat terhadap semua kebijaksanaan yang dihasilkan khususnya dalam regulasi, kepemimpinan, relasi antara semua elemen negara dan juga relevansi dan aplikasi nyatanya.

Kebenaran (Verum)

Kebenaran mengandung arti hitam dan putih, sekalipun per-definisinya kebenaran merupakan hal yang relatif dan bisa memunculkan penafsiran ganda (*ambivalensi*) dalam banyak konteks dan perspektif. Kebenaran adalah nilai tentang bagaimana suatu perbuatan atau kebijaksanaan memiliki makna yang tidak menyinggung faktor-faktor kultural yang boleh dikatakan sebagai tak terdefinisi dalam lingkungan pengembangan nilai. Jika kebaikan menunjukkan kualitas nilai tentang apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan maka, kebenaran secara lebih kuat berbicara mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan jika akan menimbulkan error atau kesalahan-kesalahan. Dasar historis dan pengulangan sejarah tentunya men-

jadi acuan mengapa nilai-nilai kebenaran harus ditempatkan pada ruang yang tepat.

Kebenaran terbagi ke dalam beberapa bentuk yakni, kebenaran logis-matematis, kebenaran metafisis, dan kebenaran teleologis, terkadang dari sisi agama ada juga kebenaran teologis.

Keindahan

Suatu perbuatan dikatakan ber-etika jika penuh dengan nilai keindahan. Keindahan adalah salah satu nilai yang bermain pada tataran kepuasan. Dengan kata lain, suatu perbuatan hendaknya sensitif dan mengapresiasi nilai kepuasan batiniah. Kebijakan-kebijakan negara bisa saja benar dan baik di satu sisi, namun tidak indah di sisi lain. Kekakuan suatu Undang-Undang dalam penerapannya bisa juga dimengerti sebagai bagian dari kurangnya penekanan pada aspek keindahan. Administrasi negara tentang bagaimana pengurus negara, mitra pengurus (*swasta besar*) dan juga yang diurus (*swasta kecil* dan *warga kebanyakan*) hendaknya dimengerti sebagai sebuah seni yang berisikan keindahan. Dan alangkah naif, jika nilai ini disepelekan dalam praktik pengurusan negara.

Persatuan (Unum)

Nilai persatuan di titik ini menjamin adanya konsensus bersama di mana suatu perbuatan yang baik, yang benar dan yang indah bisa bernilai universal. Persatuan di dalam pemahaman yang holistik menyangkut etika mengandaikan adanya kemauan untuk masuk dalam aturan bersama yang sudah ditetapkan. Dan untuk itu persatuan tidak boleh dipandang sebatas potensi mendatangkan konflik, melainkan potensi yang bisa memungkinkan manusia menjadi kreatif dalam mengelola konflik dan mengupayakan perdamaian, serentak memberi ruang tumbuh bagi yang lainnya.

STANDAR NILAI

Keempat dimensi ini merupakan entitas yang tidak identik. Untuk beberapa kasus bisa berbeda secara absolut, sekalipun bisa didudukkan pada diskursus atau wacana yang sama. Idealnya etika yang dihidupi dalam semua proses mengurus/mengelola negara mengolaborasi keempat unsur ini secara holistik.

Etika dalam mengurus/mengelola negara sangat erat dengan nilai-nilai serta batasan moral yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pengurusan/Pengelolaan negara yang baik dan benar adalah pengelolaan yang didasarkan pada pemahaman akan nilai yang berkembang, oleh tiga elemen penting negara,

pengurus (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif), Mitra Pengurus (Swasta Besar, LSM, Ormas) dan yang diurus (warga negara termasuk Swasta Kecil).

Standar nilai bagi pejabat tampak dalam tunduk pada Hukum dan Peraturan (termasuk nilai-nilai demokrasi-pengelolaan yang baik, transparansi, prinsip birokrasi, partisipasi, akuntabilitas, dll (Wibawa, 2012), responsif terhadap posisi sopol budek dan nilai-nilai religius, kepentingan minoritas, kapasitas (termasuk kredibilitas, kapabilitas serta integritas) pengurus harus sesuai dengan standar nilai, memiliki inteligensi yang tinggi (Wahyudi, 1992:317), adaptasikan model utilitarianisme dan deontologi di titik ini sebagai kewajiban untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh warga.

Standar nilai bagi mitra pejabat dengan menjalankan kemitraan yang seimbang, tanpa orientasi pada pelestarian KKN, suap, manipulasi, monopoli, dan penyakit-penyakit politik-ekonomi lainnya, berorientasi sosial (kesejahteraan) bukan pada keuntungan ekonomis, bertanggung jawab terlebih dalam memajukan dan memberikan kebaikan bagi “yang diurus” bukan hanya untuk kebaikan dan kesenangan “pengurus”, swasta besar dituntut humanis dan adil terhadap swasta kecil dan warga negara yang lain.

Standar nilai bagi rakyat dilakukan dengan mengerti dan menggunakan hak dan kewajiban secara wajar, tidak hanya reaktif, tetapi aktif, bahkan proaktif, mampu membarui dan berpartisipasi dalam ruang-ruang Demokrasi yang sudah disediakan. Rakyat mesti kritis, humanis, terbuka, serta tunduk di bawah kontrak sosial dengan pengurus negara, serentak membangun kerja sama yang mutual dan timbal balik serta seimbang dengan semua elemen negara yang lainnya, sadar dan bisa terlibat dalam proses pendewasaan diri sebagai warga negara (yang diurus) dalam dinamika perkembangan yang ada.

BANALISASI

Terhadap standar-standar nilai yang ada seringkali terjadi pendangkalan yang berjalan dalam level yang sederhana, maupun dalam level yang lebih kompleks dan luas. Beberapa kemungkinan buruk akibat pendangkalan itu berbahaya bagi negara yang sedang dalam proses pengurusan. Pendangkalan ini juga memengaruhi posisi ketiga elemen negara ini. Pendangkalan-pendangkalan yang sering terjadi antara lain:

Pertama, terhadap pengurus Negara: praktik KKN, patologi birokrasi akibat anti-merit sistem dan cenderung mengedepankan primordialisme (keluarga dan kenalan saja), manipulasi dan *mark up*, bermain di tataran formal, bukan pada substansi dan solusi, tidak adanya kontekstualisasi kebijaksanaan politik

(generalisasi yang keliru), negara cenderung otoriter, eksklusif, tertutup dan represif, munculnya *masochisme* dalam diri para pengurus negara seiring indiferentisme yang kuat.

Kedua, terhadap mitra pengurus: hanya berorientasi pada uang, tidak bisa masuk dalam iklim kompetisi yang dialektis, mengesampingkan kelestarian alam (keseimbangan ekosistem), kesejahteraan warga, dan relasi kritis dengan pengurus Negara, menciptakan situasi monopoli dan mengontrol kerja pengurus negara dengan beragam intrik yang merugikan negara secara keseluruhan, tidak mengedepankan tanggung jawab dan penghargaan akan nilai yang berkembang dalam suatu wilayah dalam negara khususnya dan negara umumnya, ikut menciderai demokrasi dengan menghidupkan praktik KKN dan beragam bentuk penyakit politik-ekonomi lainnya, terlibat dalam berbagai macam konspirasi politik untuk mengembosi perkembangan demokrasi dengan menjual modal sebagai alasan yang paling rasional.

Ketiga, terhadap yang diurus: tidak menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara maksimal, acuh tak acuh terhadap situasi sopol-budek yang berkembang termasuk terhadap berbagai krisis yang ada. Hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah, menjadi konsumtif dan tidak produktif, hanya bisa mengeluh, tanpa memberikan kritik yang konstruktif dan solusi-solusi alternatif bagi pengelolaan (atau pengurusan) Negara, terbawa arus anarkhisme dan (seolah) menikmati situasi chaos dalam kehidupan sosial, politik tanpa mengupayakan solusi damai, ikut mengembangkan primordialisme yang sempit dan tak terarah, menjadi egois, individualis dan melupakan dasar pendirian bangsa dan negara ini.

KESIMPULAN

Mengurus Negara merupakan tanggung jawab semua pihak. Tanggung jawab ini disertai dengan etika. Dalam telaahan di atas ditemukan banyak etika yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan bersama, misalnya utilitarianisme, deontologi, pragmatisme, hedonisme, dll. Banyaknya praktik hidup menumbuhkan gagasan dalam diri kita bahwa sebenarnya manusia selalu hidup dengan etika. Sama halnya dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, etika telah menjadi roh atau jiwa yang memberikan kekuatan kepada semua orang. Dalam tataran hirarki, pemerintah mendapat posisi yang paling tinggi, disusul dengan pengusaha, petani, dan pengangguran. Dibalik itu juga akan ditemukan berbagai prinsip etika yang tidak dijalankan dengan baik sehingga pincang. Banyak praktik yang tidak baik dilakukan.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Reyburn, Hugh. 1921. *The Ethical Theory of Hegel: A Study of the Philosophy of Right*. Oxford: Clarendon Press.
- Bertens, K. 1997. *Etika*. Jakarta, Gramedia.
- Frondizi, Risieri. 2001. *Pengantar Filsafat Nilai*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hardiyanta, Petrus Sunu. 2007. *Foucault - Bengkel Individu Modern, Disiplin Tubuh*, Yogyakarta: LKIS.
- Magnis-Suseno, Franz. 1997. *Model Pendekatan Etika*. Penerbit Kanisius; Yogyakarta.
- , 2006. *Etika Abad Kedua Puluh*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nugroho, Stanislaus. "Formalisme Etika: Telaah Max Scheler Atas Etika Kewajiban Kant", *Jurnal Etika Sosial*, Vol. 9, No. 1 (Agustus 2004), Atma Jaya Yogyakarta, hal. 30-38.
- Wahana, Paulus. 2004. *Nilai Etika Aksiologi Max Scheler*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibawa, Samodra. 2012. *Mengelola Negara*. Yogyakarta: Gava Media.